
PENERAPAN SISTEM INFORMASI BERBASIS KOMPUTER PADA APLIKASI MONITORING KEUANGAN DAN ASET (TERKAIT PENATAUSAHAAN PIUTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA)

Zaenal Sekty Wijaya¹
sekty9@gmail.com

Abstract

These day, the development of information and technologies in Indonesia is in steady pace and right now also involving other sectors including private and government sectors. Information and technologies has become a common tool that also has been used by many people to support and sustain their daily needs. With the usefulness of the modern technologie, it's expected that human can invent a new form of system of information that can be used as a tool for running a business or to achieve the organization's goals.

The information that has been given by the system of information is really vital for some decision makers. The preciseness of a decision that made by the decision makers does rely on the information which they retrieve. If the information is not reliable, it will affect the decision that has been made. If a company or some government institution make the wrong choice, the company will suffer loss or the aim of the institution will never be achieved. That's why many companies spend a lot of money for their system of information so they can get a reliable source of information. A good information is an information which is accurate, actual, and relevant.

Key word: *sistem informasi, tuntutan ganti rugi, monika*

A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia, dapat dikatakan bahwa teknologi informasi telah merasuki segala bidang dan meluas ke berbagai lapisan masyarakat dalam kehidupan. Baik dalam suatu organisasi maupun instansi dalam melaksanakan proses bisnis seharusnya telah memanfaatkan teknologi informasi tersebut guna mendapatkan informasi yang berkualitas. Informasi yang berkualitas sangatlah penting bagi pengambil kebijakan atau manajer dalam mengambil suatu keputusan. Informasi yang berkualitas ini tentu terbentuk dari adanya sistem informasi yang dirancang dengan baik. Pemanfaatan sistem informasi

¹ Magister Akuntansi Universitas Sebelas Maret Surakarta

yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi yang bersangkutan. Namun ironisnya pada sektor publik masih terdapat beberapa instansi yang belum optimal dalam menerapkan teknologi informasi ini. Fokus pembahasan pada penelitian ini adalah terkait penerapan sistem informasi berbasis komputer pada aplikasi Monitoring Keuangan dan Aset (Monika) terkait penatausahaan piutang tuntutan ganti kerugian negara.

Pada Kementerian Keuangan terdapat Subbagian Tuntutan Ganti Rugi dan Penagihan (TGR dan P) yang tugas pokok dan fungsinya adalah menangani kasus tuntutan ganti kerugian negara. Unit Subbagian TGR dan P tersebut merupakan satu-satunya unit di lingkungan Kementerian Keuangan yang menangani tuntutan ganti rugi dengan jumlah satuan kerja yang jumlahnya lebih dari 2200 satuan kerja di Indonesia. Selain hal tersebut, proses mekanisme penyelesaian kasus ganti kerugian negara dapat dikatakan memakan waktu yang relatif lama. Dalam hal kasus kerugian negara diselesaikan secara damai, maka penanggung jawab kerugian negara dapat melakukan pemulihan kerugian negara dengan cara mengangsur dengan jangka waktu maksimal 24 bulan.

Dengan memperhatikan banyaknya jumlah satuan kerja, jumlah kasus yang ditangani dan proses mekanisme penyelesaian yang relatif lama, tentu instansi tersebut membutuhkan database atau suatu sistem informasi yang handal sehingga informasi yang dihasilkan dapat lebih akurat dan benar-benar berkualitas. Dengan adanya sistem informasi yang berkualitas diharapkan instansi tersebut dapat mengambil keputusan yang tepat dan dapat menghemat biaya yang seharusnya dikeluarkan dalam rangka memperoleh data yang benar, cepat, dan akurat. Untuk membantu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sehari-hari Subbagian TGR dan P tersebut, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan telah membuat aplikasi Monika yang pengoperasiannya menggunakan basis internet. Aplikasi ini dapat diakses oleh unit satuan kerja dengan menggunakan user id dan password yang telah dibuat sebelumnya. Pada mulanya, salah satu tujuan dibuatnya aplikasi ini adalah untuk membangun database kasus tuntutan ganti kerugian negara di lingkungan Kementerian Keuangan secara digital dan dapat menyajikan data perkembangan tindak lanjut penanganan ganti kerugian negara.

B. Permasalahan

1. Apakah tujuan dari aplikasi Monitoring Keuangan dan Aset (Monika) terkait penatausahaan piutang ganti kerugian negara telah tercapai?
2. Apa saja kendala dalam penerapan sistem informasi menggunakan aplikasi Monika?

C. Pembahasan

1. Definisi Sistem Informasi

Sistem informasi ini terdiri dari kata sistem dan informasi. Sistem berasal dari bahasa Latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustema*) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang saling bekerja sama atau yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan. Sedangkan kata informasi berasal dari kata Perancis kuno *informacion* (tahun 1387) yang diambil dari bahasa Latin *informationem* yang berarti “garis besar, konsep, ide”. Informasi merupakan data

yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Sumber dari informasi adalah data. Data merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal datum atau data item. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. (Jogiyanto,2005:11). Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah sekumpulan prosedur organisasi yang dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan yaitu memberikan informasi bagi pengambil keputusan dan untuk mengendalikan organisasi. Suatu perusahaan atau instansi pemerintahan pasti membutuhkan suatu sistem informasi karena sistem informasi tersebut sangatlah menunjang kinerja perusahaan atau instansi pemerintah. Informasi dalam lingkup sistem informasi memiliki beberapa ciri yaitu:

- a. Baru, informasi yang didapat sama sekali baru dan segar bagi penerima.
- b. Tambahan, informasi dapat memperbaharui atau memberikan tambahan pada informasi yang telah ada.
- c. Korektif, informasi dapat menjadi suatu koreksi atas informasi yang salah sebelumnya.
- d. Penegas, informasi dapat mempertegas informasi yang telah ada.

Informasi yang berguna bagi pengambil kebijakan yaitu informasi yang berkualitas, sehingga keputusan yang diambil oleh pengambil kebijakan tersebut dapat tepat sasaran dan benar. Kualitas dari suatu informasi ini tergantung dari 3 (tiga) hal, yaitu informasi harus:

- a. Akurat, berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bisa atau menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya.
- b. Tepat pada waktunya, berarti informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat.
- c. Relevan, tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang lainnya berbeda.

Perkembangan sistem informasi meliputi sistem informasi tradisional dan sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi tradisional yaitu suatu sistem informasi yang dioperasikan dan dikelola secara manual. Sedangkan sistem informasi berbasis komputer mengandung arti bahwa komputer memainkan peranan penting dalam sebuah sistem pembangkit informasi. Secara teori, penerapan sebuah sistem informasi memang tidak harus menggunakan komputer dalam kegiatannya. Tetapi pada prakteknya tidak mungkin sistem informasi yang sangat kompleks itu dapat berjalan dengan baik jika tanpa adanya komputer. Dengan integrasi yang dimiliki antar subsistemnya, sistem informasi akan mampu menyediakan informasi yang berkualitas, tepat, cepat dan akurat sesuai dengan manajemen yang membutuhkannya.

Sistem informasi memiliki komponen berupa subsistem yang merupakan elemen elemen yang lebih kecil yang membentuk sistem informasi tersebut misalnya bagian input, proses, output. Tanpa ketiga itu sistem informasi tidak dapat berjalan dengan baik.

1. Input: sekumpulan data yang akan kita olah menjadi sebuah informasi yang nantinya akan kita sajikan bagi masyarakat.
2. Proses: suatu kegiatan dimana kita mengolah seluruh data yang ada untuk menghasilkan suatu informasi.

3. Output: informasi-informasi yang dapat dengan mudah di peroleh, di mengerti dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Selain elemen-elemen di atas, sistem informasi juga memiliki komponen fisik berupa:

1. Perangkat keras komputer: CPU, storage, perangkat input/output, terminal untuk interaksi, media komunikasi data.
2. Perangkat lunak komputer: perangkat lunak sistem (sistem operasi dan utilitinya), perangkat lunak umum aplikasi (bahasa pemrograman), perangkat lunak aplikasi (aplikasi akuntansi).
3. Basis data: penyimpanan data pada media penyimpan komputer.
4. Prosedur: langkah-langkah penggunaan sistem.
5. Personil: yang mengoperasikan sistem, menyediakan masukan, mengkonsumsi keluaran dan melakukan aktivitas manual yang mendukung sistem.

2. Proses Bisnis Subbagian Tuntutan Ganti Rugi dan Penagihan

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206 Tahun 2014, disebutkan bahwa Subbagian Tuntutan Ganti Rugi dan Penagihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pertimbangan dan menindaklanjuti penanganan kasus kerugian negara serta melakukan pemantauan dan evaluasi penyelesaian ganti rugi dan penagihan lingkup Kementerian Keuangan. Jumlah unit satuan kerja yang ditangani oleh Subbagian TGR dan P adalah sebanyak 11 unit eselon I dan 5 unit pusat. Adapun rinciannya dari unit-unit tersebut yaitu Sekretariat Jenderal, Ditjen Anggaran, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Kekayaan Negara, Ditjen Perimbangan Keuangan, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Inspektorat Jenderal, Badan Kebijakan Fiskal, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanaan dan Cukai.

Definisi kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu, kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Memperhatikan definisi tersebut, dapat diketahui terdapat beberapa unsur dari kerugian negara, yaitu:

- a. Ada obyek yang berkurang;
- b. Ada subyek atau pelaku kerugian negara;
- c. Terdapat jumlah kerugian negaranya yang nyata dan pasti; dan
- d. Merupakan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Unsur-unsur di atas merupakan syarat kerugian negara secara akumulatif, bukan alternatif sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam setiap kerugian negara yang terjadi, negara belum tentu mempunyai hak tuntutan kepada pelaku atau pegawai negeri bersangkutan. Dalam hal pegawai negeri tersebut dinyatakan tidak melanggar hukum baik sengaja maupun lalai dalam peristiwa kerugian negara maka negara tidak mempunyai hak tuntutan terhadap orang tersebut. Sebaliknya, jika orang tersebut dinyatakan melawan hukum, maka barulah negara mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian negara sehingga negara mempunyai piutang ganti kerugian negara

terhadap penanggung jawab kerugian negara tersebut. Piutang ganti kerugian negara tersebut haruslah ditatausahakan dan disajikan pada Laporan Keuangan. Selain untuk disajikan pada Laporan Keuangan, pada tiap semester Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan rekonsiliasi dengan masing-masing unit eselon I guna mencocokkan data yang benar.

Proses penuntutan ganti kerugian negara di lingkungan Kementerian Keuangan ditangani oleh Subbagian TGR dan P. Jenis kasus yang ditangani Subbagian TGR dan P tersebut ada dua macam, yaitu Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan. Tata cara dalam melakukan penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi ini diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 508/KMK.01/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Bukan Kekurangan Perbendaharaan di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 213/PMK.01/2014. Sedangkan untuk kasus Tuntutan Perbendaharaan, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.01/2009 tentang Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Terhadap Bendahara di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 21/PMK.01/2015. Tuntutan Perbendaharaan ini dilakukan untuk menangani kasus kerugian negara terhadap bendahara berupa kekurangan perbendaharaan, sedangkan untuk kerugian negara bukan kekurangan perbendaharaan yang dilakukan oleh selain bendahara menggunakan mekanisme tuntutan ganti rugi.

Informasi kerugian negara yang diperoleh oleh Subbagian TGR dan P merupakan informasi yang diperoleh langsung dari unit satuan kerja yang terjadi kerugian negara melalui persuratan. Proses surat menyurat pasti membutuhkan waktu yang cukup lama terutama untuk satuan kerja yang mempunyai unit vertikal, karena persuratan dilakukan secara berjenjang/hierarkis. Informasi kasus kerugian negara yang diterima oleh Subbagian TGR dan P tersebut kemudian ditatausahakan dan disimpan dalam bentuk *hard file*. Selain penatausahaan dalam bentuk *hard file*, Subbagian TGR dan P juga melakukan pencatatan data kasus kerugian negara dan realisasi angsurannya pada aplikasi Monika. Aplikasi Monika ini digunakan untuk melakukan pendokumentasian kasus kerugian negara yang telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan u.p. Sekretaris Jenderal dan telah dinyatakan bersalah. Dalam aplikasi Monika tersebut belum disediakan menu untuk melaporkan kasus kerugian negara yang baru. Apabila dalam aplikasi tersebut disediakan suatu modul untuk melakukan pelaporan kasus kerugian negara yang baru, maka dalam hal terjadi kerugian negara pada satuan kerja di daerah informasi akan lebih cepat diterima oleh Subbagian TGR dan P. Kondisi saat ini, penyampaian informasi terkait kerugian negara kepada Menteri Keuangan masih terdapat jeda waktu yang cukup lama dengan waktu kejadian kasus kerugian negara.

Proses penanganan penyelesaian kasus kerugian negara ini membutuhkan waktu yang relatif lama bahkan hingga puluhan tahun, terutama untuk kasus yang nilainya besar. Berdasarkan data perkembangan kasus kerugian negara semester I tahun 2015 dari Biro Perencanaan dan Keuangan, diketahui bahwa kasus kerugian negara yang ditangani oleh Subbagian TGR dan P masih tercatat sejumlah 103 kasus dengan nilai sebesar Rp16.373.313.203,55. Dengan jumlah kasus yang banyak dan tiap tahun selalu bertambah, seharusnya Subbagian TGR dan P mempunyai data base secara digital guna mempermudah penyimpanan data dan pemrosesan kasus.

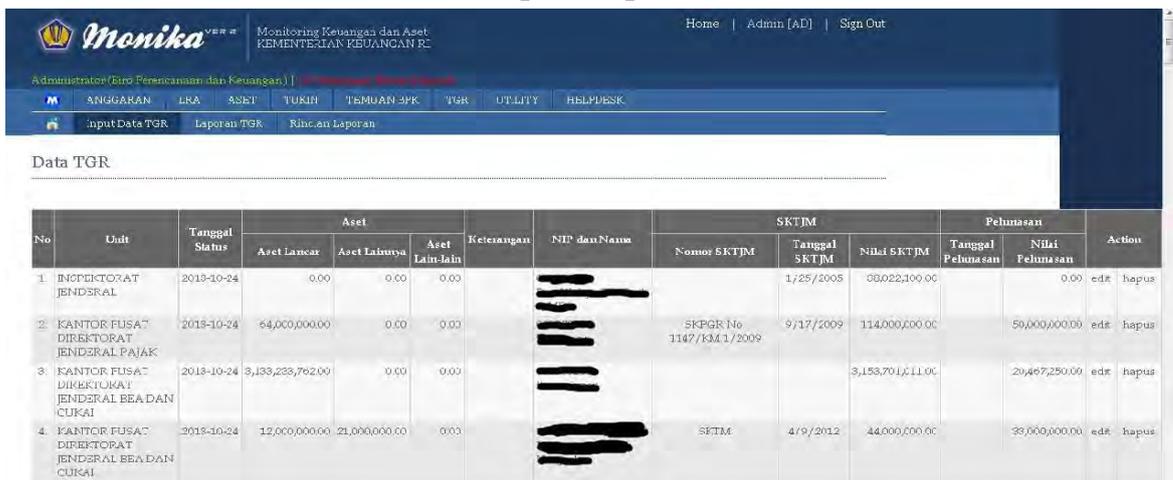
3. Sistem Informasi Kerugian Negara Pada Aplikasi Monika

Aplikasi Monika adalah aplikasi monitoring berbasis internet yang menjalankan fungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyajikan informasi terkait keuangan dan aset di lingkungan Kementerian Keuangan. Aplikasi monika ini dapat diakses dengan alamat website www.monika.depkeu.go.id. Dalam aplikasi Monika tersebut terdapat beberapa modul, yaitu modul Anggaran, Laporan Realisasi Anggaran, Aset, Tukin, Temuan BPK, Tuntutan Ganti Rugi, utility, dan helpdesk. Selanjutnya yang akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini hanya terkait modul Tuntutan Ganti Rugi. Tujuan dibuatnya modul Tuntutan Ganti Rugi pada aplikasi Monika yang dituliskan pada website Monika yaitu:

1. Untuk membangun basis data kerugian negara yang diperoleh dari seluruh satuan kerja lingkup Kementerian Keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai penyelesaian kerugian negara baik berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) maupun Tuntutan Perbendaharaan (TP) pada satker lingkup Kementerian Keuangan secara cepat, tepat, dan akurat;
3. Menyediakan informasi posisi piutang TGR/TP pada setiap tanggal penyusunan Laporan Keuangan baik semesteran maupun tahunan;
4. Memfasilitasi rekonsiliasi posisi kerugian negara antara Biro Perencanaan dan Keuangan dengan masing-masing unit eselon I di lingkup satker di bawahnya.

Modul Tuntutan Ganti Rugi ini terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu input data TGR, Laporan TGR, dan Rincian Laporan. Sumber data modul TGR/TP ini adalah dari input manual data kerugian negara. Adapun tampilan dari masing-masing bagian modul TGR sebagai berikut:

Gambar 1.1 Tampilan input data TGR



No	Unit	Tanggal Status	Aset			Keterangan	NIP dan Nama	SKTJM			Pelunasan		Action
			Aset Lancar	Aset Labanya	Aset Lain-lain			Nomor SKTJM	Tanggal SKTJM	Nilai SKTJM	Tanggal Pelunasan	Nilai Pelunasan	
1.	INSPEKTORAT JENDERAL	2018-10-24	0.00	0.00	0.00			1/25/2005	50022,100.00		0.00	edit hapus	
2.	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	2018-10-24	64,000,000.00	0.00	0.00		SKPGR No 1147/KM.1/2009	9/17/2009	114,000,000.00		50,000,000.00	edit hapus	
3.	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI	2018-10-24	3,133,233,762.00	0.00	0.00				3,153,701,111.00		29,467,250.00	edit hapus	
4.	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI	2018-10-24	12,000,000.00	21,000,000.00	0.00		SETM	4/9/2012	44,000,000.00		33,000,000.00	edit hapus	

Gambar 1.2 Tampilan Laporan TGR

Laporan TP dan TGR

No	UNIT ESELON I	ASET			Total Kerugian Negara	Keterangan
		Lancar	Lainnya	Lain-lain		
1.	SEKRETARIAT JENDERAL	1,903,124,183	0	0	1,903,124,183	-
2.	INSPEKTORAT JENDERAL	0	0	0	0	-
3.	DITJEN PAJAK	706,850,288	100,487,653	0	807,337,941	-
4.	DITJEN BEA DAN CUKAI	4,374,807,792	62,983,106	0	4,437,790,898	-
5.	DITJEN PERBENDAHARAAN	2,288,596,561	0	0	2,288,596,561	-
6.	DITJEN KEKAYAAN NEGARA	152,412,540	15,300,000	0	167,712,540	-
7.	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN	1,057,251,273	1,499,000	0	1,058,750,273	-
	JUMLAH	10,483,042,637	180,269,759	0	10,663,312,396	-

Gambar 1.3 Tampilan Rincian TGR

Rincian TP dan TGR

No	UNIT ESELON I	Jumlah Kerugian Negara	Angsuran	Saldo
1.	SEKRETARIAT JENDERAL	1,992,575,183	89,451,000	1,903,124,183
2.	INSPEKTORAT JENDERAL	38,022,100	0	38,022,100
3.	DITJEN PAJAK	1,009,217,420	164,877,177	844,340,243
4.	DITJEN BEA DAN CUKAI	5,023,316,108	607,525,210	4,415,790,898
5.	DITJEN PERBENDAHARAAN	3,233,494,371	714,367,453	2,519,126,918
6.	DITJEN KEKAYAAN NEGARA	220,417,940	52,905,400	167,512,540
7.	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN	1,100,313,395	41,563,122	1,058,750,273
	JUMLAH	12,617,356,517	1,670,689,362	10,946,667,155

Pada modul Input Data TGR rincian data kasus diinput secara manual. Semua data terkait kasus kerugian negara serta dokumen-dokumen pendukung dicatat melalui modul tersebut. Data informasi yang muncul pada modul tersebut yaitu jenis kerugian negara beserta penanggung jawabnya, jenis penyelesaian kerugian negara, total kerugian negara, realisasi angsuran kerugian negara, dan tanggal terakhir dilakukan update data pada aplikasi Monika. Selanjutnya pada modul Laporan TGR digunakan untuk menyajikan aset lancar dan aset lainnya. Yang dimaksud aset lancar pada aplikasi monika ini adalah jumlah kerugian negara yang dimungkinkan menjadi penerimaan negara selama satu periode pelaporan kedepan. Sedangkan pada modul

Rincian Laporan menyajikan informasi jumlah kerugian negara, realisasi pemulihan kerugian negara dan sisa saldo kerugia negara pada masing-masing unit eselon I Kementerian Keuangan.

Dalam aplikasi Monika tersebut belum disediakan adanya data base kasus kerugian negara secara keseluruhan. Selain permasalahan terkait data base, informasi kerugian negara yang dihasilkan oleh aplikasi Monika tersebut dapat dikatakan belum akurat. Jika melihat data pada aplikasi Monika dan data pada Biro Perencanaan dan Keuangan untuk periode pelaporan yang sama maka akan terdapat perbedaan data. Sebagai contoh untuk sisa saldo kerugian negara di Biro Perencanaan dan Keuangan pada semester I tahun 2015 adalah sebesar Rp16.373.313.203,55, sedangkan pada aplikasi Monika sisa saldo kerugian negaranya tercatat sebesar Rp10.946.667,155. Hal tersebut menunjukkan data realisasi pemulihan kerugian negara yang tersaji dalam aplikasi Monika belum menunjukkan jumlah yang sama dengan kondisi nyata.

Selain permasalahan di atas, sistem pada aplikasi Monika saat ini belum dapat menyajikan rincian jumlah kasus baru yang masuk, kasus yang lunas pada periode itu, dan berapa total nilai realisasi angsuran pada periode itu. Penyebab ketidakakuratan dari informasi yang dihasilkan dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu disebabkan karena orang atau pegawai yang seharusnya melakukan update data tidak melakukan update data, terjadi kesalahan penulisan dalam memasukkan update data, tidak terdapat akses jaringan internet untuk melakukan update data kerugian negara, dan tidak mengetahui bagaimana cara melakukan update data pada aplikasi Monika. Permasalahan ini dapat diatasi dengan melakukan pemantauan update data kerugian negara secara rutin dan melakukan sosialisasi kepada pegawai yang belum paham bagaimana cara melakukan update data pada aplikasi Monika. Kewajiban untuk melakukan update data pada aplikasi Monika ini telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 95/KMK.01/2012 tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan dan Aset Di Lingkungan Kementerian Keuangan Dengan Menggunakan Aplikasi Monitoring Keuangan Dan Aset.

D. Kesimpulan

1. Tujuan dari aplikasi Monika terkait penatausahaan piutang ganti kerugian negara belum tercapai.
2. Beberapa kendala dalam penerapan sistem informasi pada aplikasi Monika yaitu:
 - a. Tidak terdapat jaringan internet yang memadai untuk melakukan akses aplikasi Monika;
 - b. Kurangnya pengetahuan dalam melakukan update data/mengoperasikan aplikasi Monika;
 - c. Terjadi kesalahan penulisan dalam melakukan update data pada aplikasi Monika; dan
 - d. Kurangnya kesadaran dalam melakukan update data pada aplikasi Monika.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Muhammad Zaenal. (2011). *Sistem informasi manajemen (SIM) berbasis komputer*. Diambil dari: <http://www.masbied.net/2011/08/28/sistem-informasi-manajemen-sim-berbasis-komputer/>
- Arsita, Sindy. 2013. *Sistem Informasi Berbasis Komputer*. Diambil dari: <https://sindyarsita.wordpress.com/2013/11/11/sistem-informasi-berbasis-komputer/>
- Deka, Annes. (2012). *Pengertian sistem informasi berbasis komputer dengan contoh sistem pakar*. Diambil dari: <http://annesdecha.blogspot.com/2012/05/pengertian-sistem-informasi-berbasis.html>.
- Dudung. 2015. 12 Pengertian Dan Fungsi Sistem Informasi Menurut Para Ahli, Diambil dari: <http://www.dosenpendidikan.com>.
- Ekky. (2012). *Pengertian sistem informasi berbasis komputer dengan contoh sistem pakar*. Diambil dari: <http://ekky-psikologi08.blogspot.com/2012/04/pengertian-sistem-informasi-berbasis.html>
- Iam. 2010. Definisi sistem Informasi. Diambil dari: <http://chilem-iam.blogspot.com>
- Ibnu. (2010). *Sistem informasi berbasis komputer*. Diambil dari: <http://djgbierz.blogspot.com/2010/10/pengertian-sistem-informasi-berbasis.html>
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 508/KMK.01/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Bukan Kekurangan Perbendaharaan di Lingkungan Departemen Keuangan dan perubahannya
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 95/KMK.01/2012 tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan dan Aset Di Lingkungan Kementerian Keuangan Dengan Menggunakan Aplikasi Monitoring Keuangan Dan Aset
- Kutukomputer. (2009). *Sistem informasi berbasis komputer*. Diambil dari: <http://kutukomputer.net23.net/>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.01/2009 tentang Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Terhadap Bendahara di Lingkungan Kementerian Keuangan dan perubahannya
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemeterian Keuangan
- Sumarta, Sagiman. (2010). *Pengantar system informasi berbasis komputer*. Diambil dari: <http://sagimansumarta.files.wordpress.com/2010/01/apsi.pdf>
- Threads, Iwan. 2013. Pengertian Sistem Informasi Menurut Para Ahli Definisi. Diambil dari: <http://fisipuin.satugen.com/blog/Pengertian-Sistem-Informasi-Menurut-Para-Ahli-Definisi>.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Vanta, Rivany. (2011). *Evolusi sistem informasi berbasis komputer*. Diambil dari <http://rivanyvanta.blogspot.com/2011/10/evolusi-sistem-informasi-berbasis.html>

Wijaksono, Andre. 2013. Pengertian Sistem Informasi. Diambil dari: http://www.kompasiana.com/capcus/pengertian-sistem-informasi_552b09366ea834b813552d0e Yuniasih, Eli. 2014. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi. Diambil dari: http://ekonomiplanner.blogspot.com/2014/06/pengertian-sistem-informasi-akuntansi_24.html.